

V. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026





**WALI KOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 11. TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang** : a. bahwa rencana kerja perangkat daerah merupakan salah satu instrument penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat;
- b. bahwa rencana kerja perangkat daerah menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran perangkat daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6977);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026;
7. Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Payakumbuh;

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan;
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh;
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026, selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun;
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun;
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran RKPD Tahun 2026.
- (2) Renja Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Tahun 2026.

Pasal 3

- Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 bertujuan untuk :
- a. mewujudkan perencanaan teknis Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun;
 - b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
 - c. penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 memuat program, kegiatan, sub-kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 dan RKPD Tahun 2026 yang bersifat indikatif.

Pasal 5

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - c. Bab III memuat tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
 - d. Bab IV memuat rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. Bab V memuat penutup.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - g. Dinas Sosial;
 - h. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
 - i. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - j. Dinas Ketahanan Pangan;
 - k. Dinas Lingkungan Hidup;
 - l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - m. Dinas Perhubungan;
 - n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - o. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah;
 - p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - q. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
 - r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - s. dinas pertanian;
 - t. Sekretariat Daerah;
 - u. Sekretariat DPRD;
 - v. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - w. Badan Keuangan Daerah;
 - x. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - y. Inspektorat;
 - z. Kecamatan Payakumbuh Barat;
 - aa. Kecamatan Payakumbuh Timur;
 - bb. Kecamatan Payakumbuh Utara;
 - cc. Kecamatan Payakumbuh Selatan;
 - aa. Kecamatan Lamposi Tigo Nagori; dan
 - ee. Kantor Kesbangpol.
- (3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi perencanaan kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan apabila dalam pelaksanaan perubahan RKPD dan hasil pengendalian, evaluasi mengalami perubahan.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 4 September 2025

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

ZULMAETA

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 4 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,

RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025 NOMOR 11

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Payakumbuh Tahun 2026 dapat disusun. Dokumen Renja ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Tahun 2025 - 2029 yang memuat program, kegiatan, dan subkegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun anggaran 2026, sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan arah kebijakan pembangunan nasional maupun provinsi.

Penyusunan Renja ini dilakukan sebagai bagian dari siklus perencanaan tahunan daerah, dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2025 - 2029, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun 2026 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses penyusunan dilaksanakan secara partisipatif melalui koordinasi lintas perangkat daerah, pemangku kepentingan, serta masukan dari berbagai unsur masyarakat, sehingga diharapkan dapat menghasilkan rencana kerja yang responsif terhadap kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat.

Renja Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2026 ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan serta menjadi pedoman dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan berkelanjutan. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak dalam mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan

Payakumbuh, 4 September 2025
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Payakumbuh



Drs. SYAFWAL, M.M
NIP.196901161990091001

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	7
	1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	7
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	9
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	35
	2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	36
	2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD	41
	2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat	50
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	52
	3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional	52
	3.2 Tujuan dan sasaran renja perangkat daerah	54
	3.3 Program dan Kegiatan	55
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	50

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2025 Kota Payakumbuh	10
Tabel 2.2	Kinerja Pelayanan	36
Tabel 2.3	Review terhadap rancangan awal RKPD tahun lalu	43
Tabel 2.4	Usulan Program Dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kota Payakumbuh	50
Tabel 2.5	Persandingan Daftar Kegiatan Prioritas Hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2026 Dengan Rancangan Renja Perangkat Daerah	51
Tabel 3.1	Tujuan dan sasaran kota payakumbuh 2026	59
Tabel 3.2	Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2026 dan prakiraan maju tahun 2027	
Tabel 4.1	Rencana program dan kegiatan prioritas daerah kota payakumbuh tahun 2026	66

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh disusun berpedoman kepada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 dan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2026.

Renja sebagai penjabaran pelaksanaan tahunan dari Renstra merupakan dokumen yang secara substansial memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi serta merupakan acuan dalam penyusunan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Renja juga merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis Renja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka Rencana kerja Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2026 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain:

1. Disusun berpedoman pada Renstra Bappeda Tahun 2025-2029, hasil evaluasi Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2024, dan hasil evaluasi Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2025;

2. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan Penyusunan
- b. Penyusunan Rancangan Awal
- c. Penyusunan Rancangan
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah
- e. Perumusan Rancangan Akhir
- f. Penetapan

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam Menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar 1.1

Gambar 1.1
Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang – Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Reoublik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang – Undang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6977);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan;
18. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 220);
19. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 227);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032; (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, tambahan lembaran daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 79);
21. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);
23. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 15);
 24. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
 25. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor 6. Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 68);
 26. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 71);
 27. Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 73 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
 28. Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025;
 29. Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Selain aturan hukum di atas, dalam penyusunan dokumen ini juga berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022,

Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, validasidan Inventarisasi Pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Renja adalah untuk merumuskan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh untuk periode satu tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra Bappeda. Disamping itu pula sebagai acuan bagi bidang bidang di Bappeda Kota Payakumbuh dalam pencapaian program, kegiatan dan sub kegiatan Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Payakumbuh.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Renja adalah mewujudkan rencana kerja tahunan yang konsisten, implementatif dan menjadi tolak ukur penilaian kinerja serta sebagai pedoman pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan/sub kegiatan, penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat :

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Maksud dan tujuan
- 1.3 landasan hukum
- 1.4 sistematika penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat :

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi;
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD;
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat :

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah;
- 3.3 Program dan Kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bappeda

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu Renja Bappeda Kota Payakumbuh juga harus dilakukan evaluasi.

Evaluasi terhadap Renja Bappeda Kota Payakumbuh meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, pelaksanaan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan dan hasil rencana program dan kegiatan.

Penyusunan Renja Bappeda Kota Payakumbuh memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut:

- a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksanaannya.

Penyusunan Renja Bappeda Kota Payakumbuh juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2024 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2026;
- b. Memperhatikan keberlanjutan untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Capaian kinerja keluaran masing-masing sub kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dapat diuraikan sebagai berikut:

TABEL 2.1

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025
KOTA PAYAKUMBUH**

(T-C.29) LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2017

Nama Perangkat Daerah : BAPPEDA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Rasionalisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	01 PERENCANAAN									
5	01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Nilai IKM	91,5	89,39	90,75	88,1	97,08%	91,00	268,2	293,43%
		Nilai evaluasi AKIP Bappeda oleh Inspektorat		A	A	A	100,00%	A	A	
5	01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100%							
		Persentase capaian kinerja program / kegiatan		100%	100%	100%	100,00%		200%	
		Persentase sasaran, program dan kegiatan Renja Bappeda yang selaras dengan Renstra Bappeda		100%	100%	100%	100,00%		200%	200,00%

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
1									2		3			4
1					2		3			4		5		
1					2		3			4		5		
1					2		3			4		5		
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100,00%	6 Dokumen	16 Dokumen	
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	100,00%	6 Laporan	18 Laporan	
5	01	01	2.01	08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	
5	01	01	2.01	09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data					2 Data	2 Data	
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu	100%						100%	100,00%
						Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan		94,10%	95%	93,82%	98,76%	95%	282,92%	
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 orang/bulan	37 orang/bulan	39 orang	39 orang	98,76%	38 Orang/bulan	114 Orang/bulan	
5	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	16 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	38 Dokumen	40 Dokumen	
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%					100%	100%	100,00%
						Persentase layanan umum Bappeda sesuai standar		100%	100%	100%	100,00%		200%	200,00%

KODE					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Rasionalisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Realisasi (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	48 laporan	1 laporan	1 laporan	100,00%	120 Laporan	50 Laporan	
5	01	01	2.06	10	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 dokumen					1 Laporan	1 Laporan	
5	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	3 dokumen	
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan BMD	80%	80%				100,00%	180,00%	
						Persentase kondisi sarana prasarana kantor dalam kondisi baik			100%	100%	100,00%	80%	100%	
5	01	01	2.07	01	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan						1 Unit	1 Unit	
5	01	01	2.07	02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			1 unit	1 unit	100,00%	2 Unit	3 Unit	
5	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit	3 unit				18 unit	21 unit	
5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	9 unit				2 unit	11 unit	

KODE					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
1									2		3			4	
6					7		8 = (7/6)			9		10 = (5+7+9)		11=(10/4)	
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%						100%	100,00%
						Persentase layanan umum Bappeda sesuai standar			100%	100%	100%	100%		200%	
5	01	01	2.08	1	Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat		12 laporan						12 laporan	
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening air, listrik, internet, tip/fax yang dibayarkan	1 laporan	12 laporan	6 rekening	6 rekening	100,00%	12 laporan		24 laporan 6 rekening	
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	1 laporan	12 laporan	4 orang	4 orang	100,00%	12 laporan		24 laporan 4 orang	
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	80%	80%	100%	100%	100%	80%		260%	325,00%
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100,00%	1 unit		3 unit	
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 unit	26 unit	26 unit	26 unit	100,00%	25 unit		77 unit	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Rasionalisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Realisasi (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	14 unit	26 unit	13 unit	50,00%	19 unit	46 unit	
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah paket rehab gedung kantor	1 unit	1 paket	1 paket	1 paket	100,00%	1 unit	2 paket 1 unit	
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	100%					100%	100%	100,00%
						Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	100%							
						Nilai evaluasi AKIP komponen perencanaan		24,73	25,50	25,04	98,20%		49,77	
						Nilai evaluasi AKIP komponen capaian kinerja		12,39				14,00	26,39	
5	01	02	2,01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase hasil penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada/ Perda	100%							
						Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPD		100%	100%	100%	100,00%	100,00%	300%	
						Persentase pagu belanja dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat		7,70%	18,50%	7,70%	41,62%	19,50%	34,9%	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
1									2	3	4		5	6
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Rasionalisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Realisasi (%)
5	01	02	2,01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	100,00%	2 Berita Acara	6 Berita Acara	
5	01	02	2,01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	1 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	100,00%	2 Berita Acara	5 Berita Acara	
5	01	02	2,01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	25 Usulan	5 bahan 47 orang	25 usulan	25 usulan	100,00%	235 usulan	5 bahan 47 orang 235 usulan	
5	01	02	2,01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	3 Dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100,00%	3 dokumen	10 dokumen	
5	01	02	2,02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan perencanaan	100%							
						Persentase tingkat ketersediaan data pembangunan daerah		93,55%	98,50%	98,50%	100,00%	98,50%	290,55%	
						Tingkat aksesibilitas data		96,84%					96,84%	
5	01	02	2,02	0001	Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tingkat ketersediaan data pembangunan daerah		1 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100,00%		5 dokumen	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
1									2	3	4		5	6
5	01	02	2,02	0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku					1 Buku	1 Buku	
5	01	02	2,03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan dokumen perangkat daerah yang dikendalikan dan dievaluasi	100%						100%	100%
					Persentase PD yang mencapai target kinerja tahunan rata-rata minimal 90%			93,55%	93,55%	93,55%	100,00%	93,55%	280,65%	
					Persentase data capaian kinerja PD yang akuntabel			96,84%	97,25%	97,25%	100,00%	97,50%	291,59%	
5	01	02	2,03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 laporan	1 Dokumen	1 laporan	1 laporan	100,00%	1 laporan	2 laporan 1 dokumen	
5	01	02	2,03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 laporan	1 Dokumen	1 laporan	1 laporan	100,00%	2 laporan	3 laporan 1 dokumen	
5	01	02	2,04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase implementasi SIPD sesuai tahapan perencanaan	100%					100,00%	100%	100%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Rasionalisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Realisasi (%)				
											6	7	8 = (7/6)	9
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)				
		Persentase implementasi SIPD sesuai tahapan perencanaan		71,43%	71,43%	71,43%	100,00%	71,43%	142,86%					
		Tingkat aksesibilitas data		100%	100%	100%	100,00%	100%	200,00%					
5	01	02	2,04	0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%	3 Dokumen	8 Dokumen	
5	01	02	2,04	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%		6 Dokumen	
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%						100%	100%
						Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%						100%	100%
						Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	100%						100%	100%
						Persentase konsistensi program RKPD terhadap program (RPJMD) RPD		100%	100%	100%	100%	100%	300%	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
1									2	3	4		5	6	7
5	01	03	2,01												
					Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase hasil koordinasi pengendalian yang ditindaklanjuti bidang pemerintah dan pembangunan manusia	100%	100%				100%	200%	200%	
						Persentase PD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras bidang pemerintah dan pembangunan manusia	100%	100%				100%	200%	200%	
5	01	03	2,01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Pemerintah (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah rapat koordinasi bidang pemerintahan yang dilaksanakan		4 kali rapat	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	16 dokumen	4 kali rapat 2 dokumen		
5	01	03	2,01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	2 Dokumen					3 dokumen	16 dokumen		

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
1	2	3	4	5					6	7	8 = (7/6)		9	10 = (5+7+9)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)				
5	01	03	2,01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	16 PD	2 Laporan	2 Laporan	100,00%	16 laporan	16 laporan	
5	01	03	2,01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan					16 laporan	16 laporan	
5	01	03	2,01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	1 dokumen	2 Laporan	2 Laporan	100,00%	1 laporan	1 dokumen 2 laporan	
5	01	03	2,02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase hasil koordinasi pengendalian yang ditindaklanjuti bidang ekonomi	100%	100%				100%	100%	100%

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
1									2	3	4		5	6	7
						Persentase PD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras bidang ekonomi	100%					100%	100%	100%	
5	01	03	2,02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	2 Dokumen								
5	01	03	2,02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 Laporan	7 PD	2 Laporan	2 Laporan	100,00%	7 laporan	7 PD 5 laporan		
5	01	03	2,02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 Laporan	7 PD	2 Laporan	2 Laporan	100,00%	3 laporan	7 PD 5 laporan		

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
1	2	3	4	5					6	7	8 = (7/6)		9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
5	01	03	2,02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Laporan								
5	01	03	2,03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase hasil koordinasi pengendalian yang ditindaklanjuti bidang Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	100%				100%	200%	200,00%	
						Persentase PD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	100%				100%	200%	200,00%	
5	01	03	2,03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	2 Dokumen								
5	01	03	2,03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	8 PD	2 Laporan	2 Laporan	100,00%	8 laporan	8 PD 5 laporan		

KODE					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
1									2	3	4		5	6	7
5	01	03	2,03	0003											
5	01	03	2,03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	8 PD	2 Laporan	2 Laporan	100,00%	8 laporan	8 PD 5 laporan		
5	01	03	2,03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100,00%	8 laporan	6 laporan		
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah yang dimanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah	80%							75,00%	93,75%
						Persentase Hasil kelitbangan yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan		95%	95%	95%	100,00%	95,00%	285%		
5	05	02	2,02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial	100%	90%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 dokumen	290%		

KODE					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
1	2	3	4	5					6	7	8 = (7/6)		9	10 = (5+7+9)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)				
5	05	02	2,02	0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	
5	05	02	2,03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang aspek-Ekonomi dan Pembangunan	100%	95%	1 rekomendasi	1 rekomendasi	100,00%	1 dokumen	290%	
5	05	02	2,03	0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	
5	05	02	2,05		Pengembangan Inovasi dan Teknologi			100%	100%	100%	100%	100%		
5	05	02	2,05	0001	Uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi			2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	1 laporan	4 laporan	
5	05	03			PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase Fasilitas, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase)	85%					81,00%	81,00%	95,29%
5	05	03	2,02		Invensi dan Inovasi	Persentase Fasilitas, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	100%					100%	100,00%	100,00%

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Rasionalisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Realisasi (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
5	05	03	2,02	0004	Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	1 laporan					1 laporan	1 laporan	
5	05	02	2,04	0004	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	1 laporan					1 laporan	1 laporan	

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh pada tahun 2024 melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan melalui 2 (dua) kebijakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.099.611.617,- dan terealisasi sebesar Rp.7.599.448.487,- atau 93,82%, dengan uraian sebagai berikut:

A. Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

No	Kebijakan	Program	Indikator kinerja	Target Kinerja (PK)	Realisasi	Capaian
1	Pemantapan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai IKM	90.75	88.10	97.08%
			Nilai evaluasi AKIP Bappeda oleh Inspektorat	A	A	100%
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Nilai evaluasi AKIP komponen perencanaan	25,50	25,04	98,2%
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi program RKPD terhadap program (RPJMD) RPD	100%	100%	100%
2	Peningkatan Penerapan Inovasi Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil kelitbangan yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan	95%	95%	100%

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator:

- a. Nilai IKM. Target kinerja pada tahun 2024 adalah 90.75 dengan realisasi 88,10 dan capaian kinerja 97.08%.
- b. Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat. Target kinerja pada tahun 2024 adalah A dengan realisasi A dan capaian kinerja 100%.

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota didukung oleh 6 (enam) kegiatan dan 19 (sembilan belas) sub kegiatan yaitu:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pemerintah, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berupa penyusunan 5 (lima) dokumen perencanaan dan pelayanan publik yaitu Renja perubahan 2024, Renja 2025, Survey Kepuasan Masyarakat 2 semester Tahun 2024 dan SPIP dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.7.586.950,- dan terealisasi sebesar Rp.7.255.825 atau 95.64%.
 - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berupa penyusunan 6 laporan kinerja perangkat daerah yaitu laporan triwulan I, II, III, dan IV, LKPJ, LKJIP dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.61.338.500 dan terealisasi sebesar Rp.60.822.550 atau 99.16%.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sub Kegiatan ini berupa pembayaran gaji, dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN dengan target 39 orang ASN dan terealisasi sebanyak 39 orang ASN. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.4.702.018.985 dan terealisasi sebesar Rp.4.525.200.931 atau 94.11%.
 - 2) Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Sub Kegiatan ini berupa pembayaran honorarium pengelola keuangan dan honorarium pejabat pengadaan pada bappeda dengan target 1 dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN dan terealisasi 1

dokumen dengan capaian 100%, dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.253.631.900 dan terealisasi sebesar Rp.243.516.400 atau 96.01 %

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari 8 (delapan) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sub Kegiatan ini berupa penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Bappeda Kota Payakumbuh, berupa dengan target sebanyak 2 paket dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.204.250,- dan terealisasi sebesar Rp.5.611.000,- atau 90,44%.
- 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Sub Kegiatan ini berupa penyediaan karpet dan AC Standing kantor Bappeda Kota Payakumbuh, terealisasi dengan capaian kinerja 100% . Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.33.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp.31.100.000,- atau 92,01%.
- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sub Kegiatan ini berupa penyediaan bahan logistik kantor berupa air galon isi ulang, hand sanitizer, sabun cuci piring, sabun cuci tangan, alat tulis kantor, alat kebersihan kantor dengan target 38 paket Bahan logistik kantor yang disediakan dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.28.498.900,- dan terealisasi sebesar Rp.25.746.850,- atau 90,34%
- 4) Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan berupa penyediaan barang cetak (Amplop dinas, kop surat logo, memo, kop dinas, map kop dinas, lembar disposisi, kwitansi NCR, SPP/SPM), penggandaan dan penjilidan dan cetak spanduk dengan target sebanyak 9 paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.978.700,- dan terealisasi sebesar Rp.11.179.550,- atau 74,64%

- 5) **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan**
Sub Kegiatan ini berupa penyediaan 1 jenis surat kabar nasional yaitu Kompas dan 2 jenis surat kabar lokal yaitu Padang Ekspres dan Singgalang, terealisasi dengan capaian kinerja 100%, dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.20.437.800,- dan terealisasi sebesar Rp.19.800.000,- atau 96,88%
 - 6) **Fasilitas Kunjungan Tamu**
Sub Kegiatan ini berupa Penyediaan Makan dan Minum tamu berupa penyediaan makan dan minum tamu tamu pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh dengan target 1 laporan fasilitasi kunjungan dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.037.000,- dan terealisasi sebesar Rp.3.568.950,- atau 59,11%
 - 7) **Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**
Sub Kegiatan ini berupa penyediaan biaya perjalanan dinas dalam maupun luar daerah Provinsi Sumatera Barat bagi pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh untuk mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, dengan target 1 laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.584.055.000,- dan terealisasi sebesar Rp.584.055.000 - atau 100%
 - 8) **Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD**
Sub Kegiatan ini berupa pengelolaan website Bappeda, dengan target 1 Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.765.900,- dan terealisasi sebesar Rp.2.555.000,- atau 92,37%.
4. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,** terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
Sub kegiatan ini berupa pengadaan 1 unit kendaraan dinas roda dua, dengan capaian kinerja 100%, dilaksanakan dengan alokasi Rp.28.700.000,- dan terealisasi Rp.28.400.400,- atau 98,96%.
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sub Kegiatan ini berupa penyediaan jasa telekomunikasi/internet, air dan listrik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh dengan target 6 rekening penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.69.498.000,- dan terealisasi sebesar Rp.61.702.940,- atau 88,78%.
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sub Kegiatan ini berupa penyediaan jasa tenaga harian lepas yang terdiri dari penyediaan jasa sopir kepala badan dan penyediaan jasa tenaga lainnya (kebersihan dan penjaga malam) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh dengan target 4 orang penyediaan jasa pelayanan umum kantor dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.111.844.282,- dan terealisasi sebesar Rp.110.567.106,- atau 98,86%.
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sub Kegiatan ini berupa pembayaran pajak, bahan bakar minyak, servis dan pelumas kendaraan dinas roda empat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh dengan target 1 unit kendaraan dinas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan

dengan alokasi anggaran sebesar Rp.39.190.000,- dan terealisasi sebesar Rp.39.089.750,- atau 99,74%

2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub Kegiatan ini berupa pembayaran pajak, bahan bakar minyak, servis dan pelumas kendaraan dinas roda empat sebanyak 5 unit dan 21 unit untuk kendaraan dinas roda dua pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.197.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.183.369.450,- atau 93,08%.

3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub Kegiatan ini berupa servis komputer, pendingin ruangan (AC), Laptop, printer dengan target 26 unit dan terealisasi sebanyak 13 unit dengan capaian kinerja 50%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.19.820.000,- dan terealisasi sebesar Rp.10.070.000,- atau 50,81%. Rendahnya realisasi fisik dan keuangan karena beberapa asset diajukan untuk pemusnahan karena umur ekonomisnya sudah habis dan termasuk kategori rusak berat dan tingginya insentitas pekerjaan dan penyusunan dokumen pada tahun 2024 sehingga terbatas waktu untuk melakukan perbaikan atau pemeliharaan.

4) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

Sub Kegiatan ini berupa rehabilitasi gedung kantor Bappeda dengan target 1 paket rehap gedung kantor dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%, dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.105.816.000,- dan terealisasi Rp.105.008.952,- atau 99,24%.

b. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan indikator:

- a. Nilai evaluasi AKIP komponen perencanaan. Target kinerja pada tahun 2024 adalah 25,5 dengan realisasi 25,04 dan capaian kinerja 98,20%.

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah didukung oleh 4 (empat) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan yaitu :

1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Pelaksanaan Konsultasi Publik

Sub Kegiatan ini berupa Forum Konsultasi Publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan rancangan awal RKPD 2024 dan FKP RAD PG, yang dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani kepala Bappeda dan Kepala Perangkat Daerah serta perwakilan masyarakat dengan target 2 berita acara dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.34.129.800,- dan terealisasi sebesar Rp.25.862.950,- atau 75,787%.

- 2) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan ini berupa forum antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas pembangunan hasil musrenbang kecamatan dengan perangkat daerah dan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota untuk mendapat masukan penyempurnaan rancangan awal RKPD kota Payakumbuh dan juga dilaksanakan Musrenbang RPJPD 2025-2045, dengan target 2 berita acara dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.47.340.450,- dan terealisasi sebesar Rp.43.237.700 atau 91,33%.

- 3) Penyiapan Bahan Musrenbang Kecamatan

Sub Kegiatan ini berupa penyiapan bahan dan usulan untuk pelaksanaan musrenbang kecamatan dengan target 5 bahan 25 usulan dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.22.163.500,- dan terealisasi sebesar Rp.20.168.500,- atau 91,00%.

- 4) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan ini berupa penyusunan dokumen Perencanaan Kota yang terdiri dari, Rencana Kerja Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2024 dan dokumen perubahan renja pemerintah daerah Kota Payakumbuh Tahun

2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 12 Tahun 2024 dan dokumen RPJPD Kota Payakumbuh 2025-2045, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 dan dokumen teknokratik RPJMD Kota Payakumbuh 2025-2029 dengan target 4 dokumen dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.691.862.500,- dan terealisasi sebesar Rp.608.278.050,- atau 87,92%.

2. Analisa Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

1) Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Kegiatan ini berupa konsolidasi data teknis dan Rencana Kegiatan Usulan DAK pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh dengan target kinerja 1 dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.13.909.900,- dan terealisasi sebesar Rp.13.872.745,- atau 99,73%.

3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

1) Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini berupa pengendalian laporan evaluasi pelaksanaan renja Perangkat Daerah dengan target 1 laporan dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.260.300,- dan terealisasi sebesar Rp.13.610.725,- atau 95,44%

2) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Sub kegiatan ini berupa evaluasi pencapaian indikator kinerja daerah melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD, RPJMD dan Rentra perangkat Daerah dengan target 1 laporan dan terealisasi 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.326.400,- dan terealisasi sebesar Rp.10.295.935,- atau 99,70%.

4. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

1) Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

Sub Kegiatan ini berupa forum kegiatan pengumpulan data pembangunan daerah yang tertuang dalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dengan target 3 dokumen hasil penerapan sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.70.187.500,- dan terealisasi sebesar Rp.64.748.950,- atau 92,25%.

2) Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan ini berupa pelatihan untuk admin SIPD dengan target 3 dokumen hasil pembinaan sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah pemerintah kabupaten/kota dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.16.462.000,- dan terealisasi sebesar Rp.15.628.650,- atau 94,94%.

c Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator:

a. Persentase konsistensi program RKPD terhadap program (RPJMD) RPD. Target kinerja pada tahun 2024 adalah 100% dengan realisasi 100% dan capaian kinerja 100%.

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah didukung oleh 3 (tiga) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan yaitu:

1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Sub kegiatan ini berupa rangkaian proses yang mencakup kegiatan koordinasi, konsultasi, fasilitasi, dan sinkronisasi antar perangkat daerah serta pemangku kepentingan terkait dalam penyusunan dokumen

perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial budaya dengan target 2 dokumen dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.24.240.500,- dan terealisasi sebesar Rp.21.834.475,- atau 90,07%

2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Sub kegiatan ini berupa asistensi penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup bidang sosial budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh dengan target 2 laporan dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Pada Anggaran Perubahan disusun dokumen Rencana Aksi Daerah Pengarustamaan Gender (RAD PG), Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.136.911.000,- dan terealisasi sebesar Rp.131.598.512,- atau 96,12%.

3) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Sub kegiatan ini berupa koordinasi yang optimal dalam perencanaan penanggulangan kemiskinan, menyamakan persepsi dalam penyusunan instrumen penanggulangan kemiskinan dan koordinasi dan pengendalian program-program penanggulangan kemiskinan dengan target 3 2 laporan dokumen LP2KD dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.44.695.600,- dan terealisasi sebesar Rp.42.286.000,- atau 94,16%

2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

1) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

Sub kegiatan ini berupa asistensi penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup bidang ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh, dengan target 2 laporan asistensi dalam penyusunan renja bidang perekonomian dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Pada anggaran perubahan dilaksanakan penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi.

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.157.272.150,- dan terealisasi sebesar Rp.137.911.700,- atau 87,69%

- 2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian

Sub kegiatan ini berupa monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup bidang ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh, dengan target 2 laporan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan renja bidang perekonomian dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.246.350,- dan terealisasi sebesar Rp.4.590.400,- atau 87,50%.

3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- 1) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

Sub kegiatan ini berupa asistensi penyusunan dokumen (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh, dengan target 2 laporan hasil asistensi dalam penyusunan renja bidang infrastruktur dan pada APBD P 2024 dilakukan kerja sama antara Bappeda dengan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Prodi Arsitektur Universitas Bung Hatta dalam rangka peningkatan Kualitas Pendidikan, Penelitian dan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan menjadikan Kota Payakumbuh sebagai objek Perencanaan dan Penelitian Mata Mata Kuliah Studi Perencanaan Arsitektur dan Studio Tugas Akhir untuk menjadikan Kota Payakumbuh menuju green city, dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.85.581.450,- dan terealisasi sebesar Rp.81.731.500,- atau 95,50%.

- 2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur

Sub kegiatan ini berupa monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen RPJPD, dan RKPD lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah

pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh dengan target 2 laporan Monitoring dan Evaluasi dalam penyusunan Renja Bidang IPW dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.26.262.050,- dan terealisasi sebesar Rp.25.853.625,- atau 98,44%

3) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

Sub kegiatan ini berupa sinkronisasi dan koordinasi penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh dengan target 2 laporan hasil sinkronisasi Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang infrastruktur dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.101.055.050,- dan terealisasi sebesar Rp.76.169.306,- atau 73,37%.

d. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Program pengembangan inovasi daerah dengan indikator :

- a. Persentase Hasil kelitbangan yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan. Target kinerja pada tahun 2024 adalah 95% dengan realisasi 95% dan capaian kinerja 100%.

Program pengembangan inovasi daerah didukung oleh 3 (tiga) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan didukung dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

1) Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan

Sub kegiatan ini berupa peningkatan kualitas penelitian bidang pendidikan dan kebudayaan, meningkatkan kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh, dengan target 1 dokumen dan terealisasi dengan capaian 100%. Untuk Tahun 2024 Bappeda melaksanakan penelitian bidang pendidikan dan kebudayaan dengan judul “ Indeks Pembangunan Kebudayaan Berbasis ABS/SBK dengan melakukan kerja sama penelitian dengan Tim LPPM UNAND. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran

sebesar Rp.86.499.150,- dan terealisasi sebesar Rp.86.295.535,- atau 99,76%.

2). Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan didukung dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

1) Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Sub kegiatan ini berupa peningkatan kualitas penelitian bidang ekonomi dan pembangunan, meningkatkan kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh. Target kegiatan ini berupa 1 dokumen dan terealisasi dengan capaian 100%. Untuk Tahun 2024 Bappeda melaksanakan penelitian bidang pendidikan dan kebudayaan dengan judul “ Revitalisasi Pasar Pusat Pertokoan Kota Payakumbuh”. dengan melakukan kerja sama penelitian dengan Tim LPPM UNAND. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.107.479.600,- dan terealisasi sebesar Rp.107.319.940,- atau 99,85%.

3). Pengembangan Inovasi dan Teknologi dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

1) Uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi

Sub kegiatan ini berupa kegiatan motivasi inovasi dan pendampingan untuk inovasi unggulan pada perangkat daerah dengan target 2 laporan hasil fasilitasi inovasi & teknologi tepat guna (TTG) daerah dengan capaian kinerja 100%. Fasilitasi inovasi Perangkat Daerah berupa pendampingan dalam pemenuhan data dukung inovasi yang akan dinilai dalam aplikasi IGA Kementrian Dalam Negeri, kemudian untuk TTG berupa kegiatan penjangkaran karya inovasi dan TTG yang berasal dari masyarakat umum dan pelajar setingkat SMA yang ada di Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.110.503.700,- dan terealisasi sebesar Rp.109.532.635,- atau 99,12%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam norma, standar, prosedur dan kriteria dan standar pelayanan minimal maupun terhadap

indikator kinerja kunci sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Cara menentukan capaian kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh adalah berdasarkan indikator kinerja pada masing-masing urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Kedudukan Bappeda adalah sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah. Bappeda mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu maka tugas pokoknya adalah perumusan kebijakan pembangunan, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan hasil perencanaan pembangunan. Dalam menganalisa kinerja pelayanan Bappeda didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda Kota Payakumbuh 2023-2026. Adapun analisis kinerja Bappeda, Capaian kinerja secara umum dari 2 indikator kinerja utama Bappeda Kota Payakumbuh, indikator indeks kualitas perencanaan dengan status capaian “tinggi”. Untuk capaian indikator Urusan Penelitian dan Pengembangan sudah memenuhi target yang ditetapkan, yaitu daerah kategori inovatif dengan nilai indeks inovasi daerah 54,62. Capaian kinerja Bappeda Kota Payakumbuh disajikan pada tabel, sebagai berikut;

Tabel 2.2
KINERJA PELAYANAN

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	IKU	Satuan	Target Renstra Bappeda				Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18
1	Nilai Evaluasi AKIP Bappeda Oleh Inspektorat				Nilai	A	A	A	A	A	A			A	A	
2	Indeks kualitas perencanaan			√	Indeks	90%	90,5%	91%	91,5%	79,97%	87,47%			90,5%	91,00	
3	Kategori tingkat inovasi daerah			√	Kategori	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif	Inovatif	Inovatif			Inovatif	Sangat Inovatif	

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku koordinator perencanaan pembangunan dalam melaksanakan amanat peraturan perundangan dimaksud agar dapat terselenggara secara optimal, maka dalam penyusunan Rencana Kerja perlu direncanakan secara matang. Untuk itu, dalam proses penyusunannya perlu memperhatikan isu-isu tugas dan fungsi yang berkembang, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan diantaranya:

1. Belum terintegrasinya perencanaan, penganggaran dan pelaporan
2. Belum optimalnya pemantauan dan evaluasi kinerja.
3. Masih belum optimalnya fungsi monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan.
4. Kinerja belum sepenuhnya berorientasi hasil.
5. Belum optimalnya koordinasi dalam sinkronisasi perencanaan perencanaan program pembangunan.

Masih rendahnya Koordinasi pembangunan daerah, kurangnya sinergi antara perangkat daerah menyebabkan tumpang tindih program dan kurangnya keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan peran Bappeda dalam mengkoordinasikan dan mengharmonisasikan seluruh rencana kerja perangkat daerah agar pembangunan lebih efektif dan berkelanjutan.

6. Belum optimalnya fungsi pengendalian dan evaluasi pembangunan
Mekanisme monitoring belum sepenuhnya didukung dengan data yang akurat dan sistematis, sehingga hasil evaluasi belum menjadi dasar perbaikan perencanaan berikutnya. Ini juga diperparah oleh minimnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi, yang semestinya dapat menjadi fondasi dalam penyusunan kebijakan berbasis bukti

7. Belum optimalnya pemanfaatan data sectoral dan spesifik dalam perencanaan.
8. Belum sinkron/selarasnya usulan musrenbang masyarakat dengan tema pembangunan tahun berkenaan.
9. Adanya perbedaan kebijakan pusat (antar Kementerian/Lembaga) terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan.
10. Hasil evaluasi kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan pembangunan.
11. Sistem informasi perencanaan yang digunakan belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga menyulitkan proses koordinasi dan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.
12. Masih rendahnya partisipasi public dalam proses perencanaan.
13. Kegiatan penelitian masih terbatas pada lingkup tertentu, belum mencakup seluruh isu strategis daerah. Koordinasi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan penelitian juga belum terbangun dengan baik, sehingga data dan informasi yang dihasilkan sering bersifat parsial dan tidak saling terhubung, Akibatnya, hasil penelitian belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan, sehingga peluang peningkatan kualitas perencanaan berbasis hasil kajian ilmiah belum dapat dimanfaatkan secara optimal
14. Hasil riset belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam perencanaan dalam pengambil kebijakan
15. Pengembangan inovasi di perangkat daerah belum berjalan optimal, baik dari sisi jumlah, kualitas, maupun keberlanjutan. Sebagian besar inovasi yang diinisiasi belum terintegrasi ke dalam proses kerja dan belum dimanfaatkan secara luas untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
16. Kurang terfasilitasinya hasil temuan kelitbangan bagi perencanaan pembangunan.
17. Inovasi yang dilaksanakan oleh masyarakat maupun Perangkat Daerah belum terdokumentasi dengan baik, sehingga belum bisa difasilitasi secara optimal

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Bappeda di masa yang akan datang, tantangan yang harus dihadapi adalah:

1. Konsistensi Perencanaan antar waktu diperlukan pendampingan dan koordinasi intensif dalam perencanaan kinerja dan anggaran pada seluruh Perangkat Daerah
2. Penyediaan data dan informasi untuk kebutuhan perencanaan dan evaluasi diperlukan kesamaan pemahaman Perangkat Daerah terkait pentingnya kebutuhan data yang dilakukan secara benjenjang.
3. Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait Perencanaan Pembangunan Daerah terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Bappeda agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan mengimplementasikan perkembangan regulasi tersebut.
4. Perkembangan Kota Payakumbuh beserta seluruh permasalahannya diperlukan strategi tepat dan komitmen yang kuat dalam mengarahkan perkembangan Kota Payakumbuh beserta penyelesaian seluruh permasalahannya.
5. Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat yang semakin beragam seiring perkembangan Kota Payakumbuh. Sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.

Sedangkan peluang bagi Bappeda dalam melaksanakan tugasannya adalah dengan:

1. Semakin strategisnya peran Bappeda sebagai perencana dalam menentukan arah pembangunan daerah, sehingga produk perencanaan yang dihasilkan akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
2. Regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.
3. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.
4. Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal

maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah.

5. Partisipasi masyarakat, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Bappeda Kota Payakumbuh, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Bappeda Kota Payakumbuh sebagai berikut:

1. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, lemahnya budaya kinerja, keterbatasan kualitas perencanaan berbasis data sehingga sasaran dan indikator kinerja tidak sepenuhnya mencerminkan prioritas pembangunan, bahkan target yang ditetapkan kurang realistis atau sulit diukur, sistem monitoring dan evaluasi belum berjalan optimal, ditandai dengan pengukuran kinerja yang tidak konsisten, pelaksanaan evaluasi yang kurang berkala dan Tindak lanjut atas hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat belum dilaksanakan secara optimal oleh perangkat daerah. Kondisi ini mengakibatkan rekomendasi perbaikan yang telah disampaikan tidak sepenuhnya diimplementasikan, sehingga permasalahan yang sama berpotensi terulang pada periode berikutnya
2. Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan daerah, keterlibatan masyarakat yang seharusnya menjadi elemen penting dalam menyusun perencanaan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan, belum optimal. Hal ini tercermin dari minimnya jumlah usulan masyarakat dalam forum-forum perencanaan seperti FKP dan Musrenbang, rendahnya tingkat representasi kelompok rentan, masyarakat cenderung tidak mengetahui mekanisme maupun saluran yang dapat digunakan untuk menyampaikan aspirasi, serta merasa bahwa keterlibatan mereka tidak memberikan dampak nyata terhadap hasil perencanaan dan juga dalam pelaksanaan pembangunan daerah, koordinasi dan sinergis antar perangkat daerah dan stakeholder menjadi krusial untuk memastikan keselarasan program, efisiensi sumber daya, dan pencapaian tujuan pembangunan yang terintegrasi.

Koordinasi antara sektor-sektor pembangunan masih sering berjalan secara parsial dan sektoral. Perangkat daerah cenderung bekerja berdasarkan prioritas internal masing-masing tanpa adanya sinergi dan kolaborasi yang kuat. Hal ini mengakibatkan tumpang tindih program, alokasi anggaran yang tidak optimal, dan rendahnya efektivitas hasil Pembangunan, budaya kerja sektoral dan ego sektoral juga masih menjadi penghambat utama dalam mewujudkan kolaborasi yang harmonis antar instansi. Kondisi ini berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik dan capaian pembangunan daerah yang tidak maksimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan dan mekanisme koordinasi lintas sektor secara sistematis, agar proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara sinergis, efisien, dan tepat sasaran. Dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan tepat sasaran, proses evaluasi pengendalian pembangunan memegang peranan yang sangat penting. Namun hingga saat ini, evaluasi pengendalian pembangunan belum dilaksanakan secara optimal, yang berdampak pada lemahnya pemantauan capaian program dan kegiatan Pembangunan. Kondisi ini ditandai dengan belum tersusunnya sistem evaluasi yang komprehensif, kurangnya ketersediaan data yang valid dan real time, serta belum maksimalnya pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar dalam perbaikan kebijakan dan perencanaan ke depan. Selain itu, koordinasi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan evaluasi juga masih terbatas, sehingga menghasilkan analisis yang kurang menyeluruh dan tidak mendukung pengambilan keputusan strategis secara efektif. Akibat dari lemahnya evaluasi ini, banyak program pembangunan tidak dapat diukur capaian hasilnya secara jelas, sehingga potensi ketidakefisienan penggunaan anggaran pun meningkat. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas pembangunan. Untuk itu, diperlukan penguatan sistem dan kapasitas evaluasi pengendalian pembangunan yang berbasis data, terintegrasi lintas sektor, serta mampu memberikan umpan balik secara berkala dalam rangka mendukung siklus perencanaan dan penganggaran yang lebih baik.

3. Belum optimalnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah. Masih rendahnya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan lembaga riset dan perguruan tinggi, kurangnya dukungan terhadap budaya inovasi di lingkungan pemerintah, kurang terdokumentasinya hasil riset, dan kurang

dimanfaatkan oleh pengambil kebijakan mengakibatkan pemanfaatan hasil riset dan inovasi belum optimal dan masih rendahnya inisiatif dan keterlibatan aktif perangkat daerah dalam menciptakan, mengadopsi, serta mengimplementasikan inovasi di bidang pelayanan publik maupun tata kelola pemerintahan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program, kegiatan dan sub kegiatan indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2026, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026
KOTA PAYAKUMBUH

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISI KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Dana Indikatif 2026 (Rp)	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Dana Indikatif 2026 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PERENCANAAN	Kota Payakumbuh			8.459.817.206		Kota Payakumbuh			8.386.569.799
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA		Nilai IKM	91,25	6.890.517.206	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Nilai IKM		91,7	7.986.570.299
			Nilai evaluasi AKIP Bappeda oleh Inspektorat	A						7.000.536.699
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase capaian kinerja program / kegiatan	100%	91.500.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100%	86.480.550
			Persentase sasaran, program dan kegiatan Renja Bappeda yang selaras dengan Renstra Bappeda	100%						
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 dokumen	14.900.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 dokumen	14.069.050
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 laporan	76.600.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 laporan	69.766.500
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah					Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	1.322.500
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah					Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	1.322.500
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	95%	5.396.387.206	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu	100%	5.814.389.393

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISI KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Dana Indikatif 2026 (Rp)	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Dana Indikatif 2026 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 orang	5.120.467.206	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 orang/bulan	5.418.150.393
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	275.920.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	396.239.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	47.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	46.473.800
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	41 orang	47.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	46 paket	46.473.800
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 orang	-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase layanan umum Bappeda sesuai standar	100%	685.680.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Indeks layanan administrasi perangkat daerah	100%	493.164.806
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	4.800.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2paket	4.793.400
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	25.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	56.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	17.445.900
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	30.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 paket	29.993.656
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	24.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	14.962.100

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISI KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Dana Indikatif 2026 (Rp)	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Dana Indikatif 2026 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	1 dokumen	4.080.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	1 dokumen	8.866.000
	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 laporan	5.000.000	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 laporan	4.991.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	516.800.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	397.609.000
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 dokumen	1.322.500
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	20.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	13.181.250
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	80%	110.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase ketersediaan BMD	80%	52.052.950
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 paket	60.000.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3unit	8.500.700
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	50.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit	43.552.250
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah	100%	197.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	235.177.200
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		jumlah rekening air, listrik, internet, tlp/fax yang dibayarkan	1 laporam	77.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		jumlah rekening air, listrik, internet, tlp/fax yang dibayarkan	1 unit	82.997.200
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	1 laporan	120.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	27 unit	152.180.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	80%	362.950.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	80%	272.798.000

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISI KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Dana Indikatif 2026 (Rp)	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Dana Indikatif 2026 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	42.950.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	39.190.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 unit	50.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 unit	204.700.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	20.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 unit	17.260.000
	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya				250.000.000	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah paket rehab gedung kantor	1 unit	11.648.000
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Nilai evaluasi AKIP komponen perencanaan	26,5	1.089.500.000	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	100%	545.303.825
			Nilai evaluasi AKIP komponen capaian kinerja	14,5				Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	100%	
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPD	100%	883.000.000	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPD	100%	368.793.375
			Persentase Pagu Belanja dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat	20%				Persentase Pagu Belanja dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat	20%	
	Pelaksanaan Konsultasi Publik		Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	40.000.000	Pelaksanaan Konsultasi Publik		Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	29.999.775
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	75.000.000	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	71.614.975
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan		Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	25 Usulan	18.000.000	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan		Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	235 Usulan	17.999.950
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	750.000.000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	249.178.675

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISI KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Dana Indikatif 2026 (Rp)	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Dana Indikatif 2026 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase tingkat ketersediaan data pembangunan daerah	98,50%	11.500.000	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase tingkat ketersediaan data pembangunan daerah	100%	11.500.000
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				11.500.000	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	11.500.000
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase PD yang mencapai target kinerja tahunan rata-rata minimal 90%	93,55%	58.000.000	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan dan dokumen perangkat daerah yang dikendalikan dan dievaluasi	100%	27.190.200
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	46.000.000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Dokumen	15.190.450
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	12.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Dokumen	11.999.750
	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		Persentase implementasi SIPD sesuai tahapan perencanaan	71,43%	137.000.000	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		Persentase implementasi SIPD sesuai tahapan perencanaan	100%	
			Tingkat Aksebilitas Data	100%				Tingkat Aksebilitas Data	100%	137.820.250
	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	2 Dokumen	87.000.000	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Laporan	87.820.500
	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	50.000.000	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Laporan	49.999.750
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase konsistensi program RKPd terhadap program (RPJMD) RPD	100%	479.800.000	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	440.729.775

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISI KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Dana Indikatif 2026 (Rp)	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Dana Indikatif 2026 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Wilayah	100%	
								Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	100%	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Persentase hasil koordinasi pengendalian yang ditindaklanjuti bidang sosial budaya	100%	224.900.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Persentase hasil koordinasi pengendalian yang ditindaklanjuti bidang pemerintah dan pembangunan manusia	100%	204.899.825
			Persentase PD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras bidang sosial budaya	100%				Persentase PD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras bidang pemerintah dan pembangunan manusia	100%	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				22.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	86.788.150
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	150.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	32 Laporan	40.989.225
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	40.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	32 Laporan	25.230.050
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	12.900.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	32 Laporan	51.892.400

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISI KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Dana Indikatif 2026 (Rp)	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Dana Indikatif 2026 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Persentase hasil koordinasi pengendalian yang ditindaklanjuti bidang ekonomi	100%	30.000.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Persentase hasil koordinasi pengendalian yang ditindaklanjuti bidang ekonomi	100%	29.979.950
			Persentase PD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras bidang ekonomi	100%				Persentase PD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras bidang ekonomi	100%	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		7.500.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	7.499.750
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 Laporan	7.500.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	14 Laporan	7.493.350
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 Laporan	7.500.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	14 Laporan	7.487.050
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Laporan	7.500.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	14 Laporan	7.499.800
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase hasil koordinasi pengendalian yang ditindaklanjuti bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	224.900.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase hasil koordinasi pengendalian yang ditindaklanjuti bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	205.850.000
			Persentase PD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%				Persentase PD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISI KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Dana Indikatif 2026 (Rp)	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Dana Indikatif 2026 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	47.900.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	9.253.100
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	28.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	16 Laporan	70.212.150
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	59.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	16 Laporan	37.248.650
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan	90.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	16 Laporan	89.136.100
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				540.000.000	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				399.999.500
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase Hasil kelitbangan yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan	95%	540.000.000	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah	80%	300.000.000
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Jumlah dokumen penelitian bidang sosial dan kependudukan yang disusun	1 dokumen	210.000.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Persentase pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial	100%	150.000.000
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	1 Dokumen	190.000.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	1 Dokumen	150.000.000
	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	20.000.000	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				150.000.000

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISI KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Dana Indikatif 2026 (Rp)	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Dana Indikatif 2026 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan				190.000.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Persentase pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang aspek-Ekonomi dan Pembangunan	100%	150.000.000
	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	190.000.000	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	99.999.500
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Jumlah dokumen penelitian bidang ekonomi dan pembangunan yang disusun	1 dokumen	140.000.000	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH		Persentase Fasilitas, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase)	85%	99.999.500
	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	2 Laporan	120.000.000	Invensi dan Inovasi		Persentase Fasilitas, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	100%	
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	5 Laporan	20.000.000	Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah		Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	1 laporan	79.999.600
						Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi		Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	1 laporan	19.999.900

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, tidak ada usulan pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Payakumbuh.

TABEL 2.4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2026
KOTA PAYAKUMBUH

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
NIHIL					

TABEL 2.5
PERSANDINGAN DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS HASIL MUSRENBANG KECAMATAN
TAHUN 2026 DENGAN RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH

No	Hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2025				Kegiatan Sesuai Renja Perangkat Daerah Tahun 2026	
	Kegiatan Prioritas	Lokasi (Kelurahan)	Indikator Kinerja	Volume	Kegiatan / Sub Kegiatan Rancangan Renja Tahun 2025	Pagu Indikatif Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7
NIHIL						

BAB 3

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu strategis penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menetapkan delapan misi utama, dikenal sebagai Asta Cita, sebagai landasan untuk mencapai visi “**Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045**”

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Misi pertama menekankan pentingnya memperkuat pemahaman dan implementasi Pancasila sebagai ideologi negara, memperkuat sistem demokrasi, serta menjunjung tinggi HAM. Langkah ini bertujuan menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadaban.

2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.

Misi kedua fokus pada peningkatan pertahanan dan keamanan nasional melalui modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan peningkatan kesejahteraan prajurit. Selain itu, pemerintah berupaya mencapai kemandirian dalam bidang pangan, energi, dan air untuk memastikan ketahanan nasional yang komprehensif

3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi

Pemerintah berkomitmen menciptakan lapangan kerja berkualitas dengan mendorong pertumbuhan industri kreatif dan melanjutkan pembangunan infrastruktur. Selain itu, pengembangan kewirausahaan ditingkatkan melalui pelatihan dan akses permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)

4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.

Misi keempat menitikberatkan pada pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap teknologi. Pemerintah juga mendorong kesetaraan gender dengan meningkatkan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dalam berbagai sektor Pembangunan

5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di dalam Negeri

Pemerintah berfokus pada hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global

6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan

Misi keenam menekankan pembangunan yang dimulai dari desa dengan tujuan pemerataan ekonomi dan percepatan pengentasan kemiskinan. Program ini melibatkan peningkatan akses infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan di daerah pedesaan

7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan

Pemerintah berkomitmen melakukan reformasi di bidang politik, hukum, dan birokrasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selain

itu, upaya pemberantasan korupsi dan narkoba akan diperkuat melalui penegakan hukum yang tegas dan kolaboratif

8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

Misi terakhir menekankan pentingnya menjaga harmoni antara lingkungan dan budaya, serta mendorong toleransi antarumat beragama. Hal ini bertujuan menciptakan masyarakat yang inklusif, toleran, dan berkelanjutan

Asta Cita yang menekankan pada **Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan** merupakan pilar strategis dalam menciptakan tata kelola **pemerintahan yang bersih dan akuntabel**. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun birokrasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu menggerakkan pembangunan yang efektif dan berintegritas.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh mengambil peran sentral dalam menerjemahkan semangat reformasi tersebut ke dalam perencanaan yang berbasis bukti, akuntabilitas kinerja, serta integritas dalam setiap proses perencanaan dan evaluasi pembangunan.

Asta Cita ini menjadi dasar dalam perumusan tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh yang diarahkan untuk memperkuat sistem perencanaan yang transparan, meningkatkan sinergi antar perangkat daerah, serta memastikan setiap program, kegiatan dan sub kegiatan selaras dengan prinsip good governance.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2026 didasarkan pada perumusan tujuan dan

sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Rencana Strategis Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029. Sesuai dengan tugas pokok Bappeda yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, maka tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2026 yaitu: **“Meningkatnya kualitas perencanaan berbasis inovasi dan kelitbangan”**

Sasaran yang ingin dicapai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2026 Kota Payakumbuh adalah:

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Meningkatkan Peran Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah

TABEL 3.1
Tujuan dan Sasaran Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TUJUAN/SASARAN TAHUN 2026
1	2	3	4
Meningkatnya kualitas perencanaan berbasis inovasi dan kelitbangan		Nilai evaluasi AKIP Komponen Perencanaan Kinerja	26,01
		Indeks inovasi daerah	55,15
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	85,50
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	90,50
	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Persentase kebijakan berbasis bukti	87,00

Sumber: Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2025

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan dengan aktivitas intinya adalah mengkoordinasikan perangkat daerah dalam hal perencanaan pembangunan agar mampu menjalin kerjasama dan sinergi dalam pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan daerah, renja Bappeda mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :

- a) Sebagaimana ditegaskan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang menegaskan bahwa Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang kemudian ditegaskan kembali berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 bahwa Penyusunan RKPD Tahun 2026 berpedoman pada Visi, Misi, dan program kepala daerah terpilih yang dijabarkan kedalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja, program yang termuat dalam RPJMD 2025-2029, Sasaran dan prioritas pembangunan daerah pada Bab IV RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2026 ini sepenuhnya mengacu substansi yang disusun pada Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029, selanjutnya Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Payakumbuh untuk Tahun 2026 menjadi acuan Perangkat Daerah dalam merumuskan strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, serta indikator kinerja Perangkat Daerah.
- b) Mengkoordinasikan perangkat daerah dalam berkinerja mencapai tujuan Pembangunan berkelanjutan (SDG's)
- c) Mengkoordinasikan perangkat daerah dalam berkinerja mencapai penurunan angka kemiskinan /penanggulangan kemiskinan.
- d) Mengkoordinasikan perangkat daerah dalam berkinerja mencapai tujuan dan sasaran organisasinya termasuk amanah pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

- e) Mengkoordinasikan perangkat daerah dalam berkinerja mencapai tujuan sasaran Pembangunan dari pendanaan yang bersumber dari selain APBD seperti APBN berupa DAK, APBD Provinsi berupa Bantuan Keuangan pada Kabupaten/Kota yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat.
- f) Mempertimbangkan pelaksanaan tugas dan fungsi internal Bappeda yang dicerminkan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- g) Mengkoordinasikan ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan Pembangunan daerah.
- h) Mengkoordinasikan penggunaan sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/ kegiatan/ subkegiatan Pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.
- i) Mengkoordinasikan perangkat daerah dalam pelaksanaan penelitian, pengembangan inovasi.
- j) Tugas dan fungsi Bappeda dalam penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- a) Jumlah program yang akan dilaksanakan Bappeda Kota Payakumbuh pada tahun 2026 adalah sebanyak 5 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan 4 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda;
- b) Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Bappeda Kota Payakumbuh pada tahun 2026 adalah sebanyak tujuh belas kegiatan, yang terdiri dari tujuh kegiatan penunjang, dan sepuluh kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda;
- c) Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Bappeda Kota Payakumbuh pada tahun 2026 adalah sebanyak empat puluh sembilan sub kegiatan, yang terdiri dari dua puluh tiga sub kegiatan penunjang, dan dua puluh enam sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda;

- d) Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2026 adalah sebesar Rp.8.386.570.599,00,- yang bersumber dari dana APBD Kota Payakumbuh

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Payakumbuh sebagaimana tabel 3.2

TABEL 3.2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027
KOTA PAYAKUMBUH

Nama Perangkat Daerah : BAPPEDA

Kode Rekening					Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/SubKegiatan	Rencana Tahun 2026			Cacatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	7	8	9	10
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		Kota Payakumbuh		8.386.570.599			8.711.999.114
5	01				PERENCANAAN				7.986.571.099			8.286.999.444
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Nilai IKM		91,5	7.000.537.499		92,00	7.157.734.156
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi		100%	86.481.350		100%	98.275.000
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		4 dokumen	14.069.050		5 dokumen	15.645.000
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6 laporan	69.766.500		7 laporan	80.430.000
5	01	01	2.01	08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		1 dokumen	1.322.500		1 laporan	1.100.000
5	01	01	2.01	09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		2 Data	1.323.300		2 Data	1.100.000
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu		100%	5.814.389.393		100%	5.794.957.943
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		41 orang/bulan	5.418.150.393		41 orang	5.505.241.943
5	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		16 dokumen	396.239.000		1 dokumen	289.716.000
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah		100%	46.473.800		100%	49.350.000
5	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 paket	46.473.800		41 orang	49.350.000
5	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks layanan administrasi perangkat daerah		100%	493.164.806		100%	664.364.000

Kode Rekening					Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/SubKegiatan	Rencana Tahun 2026			Cacatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	7	8	9	10
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 paket	4.793.400		1 paket	5.040.000
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 paket	17.445.900		2 paket	58.800.000
5	01	01	2.06	03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 paket	29.993.656		1 paket	31.500.000
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 paket	14.962.100		1 paket	15.750.000
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan		1 dokumen	8.866.000		1 dokumen	4.284.000
5	01	01	2.06	06	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		1 laporan	4.991.000		1 laporan	5.250.000
5	01	01	2.06	08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 laporan	397.609.000		1 laporan	521.640.000
5	01	01	2.06	09	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1 dokumen	1.322.500		1 dokumen	1.100.000
5	01	01	2.06	10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1 dokumen	13.181.250		1 dokumen	21.000.000
5	1	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan BMD		80%	52.052.950		100%	110.250.000
5	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1 unit	8.500.700		2 paket	63.000.000
5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		3 unit	43.552.250		5 unit	47.250.000
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah		100%	235.177.200		100%	259.350.000
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening air, listrik, internet, tlp/fax yang dibayarkan		1 laporan	82.997.200		1 laporam	80.850.000
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia		1 laporan	152.180.000		1 laporan	178.500.000
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik		80%	272.798.000		100%	181.187.213
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 unit	39.190.000		1 unit	45.097.500

Kode Rekening					Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/SubKegiatan	Rencana Tahun 2026			Cacatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	7	8	9	10
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		27 unit	204.700.000		28 unit	52.500.000
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		15 unit	17.260.000		15 unit	21.000.000
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah paket rehab gedung kantor		1 unit	11.648.000		1 paket	62.589.713
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD		100%	545.303.825		100%	665.375.288
						Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD		100%			100%	
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase hasil penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada/ Perda		100%	368.793.375		100%	480.900.000
5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik		1 Berita Acara	29.999.775		1 Berita Acara	31.500.000
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota		1 Berita Acara	71.614.975		1 Berita Acara	63.000.000
5	01	02	2.01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan		25 Usulan	17.999.950		25 Usulan	18.900.000
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)		2 Dokumen	249.178.675		2 Dokumen	367.500.000
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan perencanaan		100%	11.500.000		100%	12.075.000
5	01	02	2.02	0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan		1 Buku	11.500.000		1 Buku	12.075.000
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan dokumen perangkat daerah yang dikendalikan dan dievaluasi		100%	27.190.200		100%	28.550.288
5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan		1 Laporan	15.190.450		1 Laporan	15.950.288

Kode Rekening					Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/SubKegiatan	Rencana Tahun 2026			Cacatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	7	8	9	10
5	01	02	2,03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		1 Laporan	11.999.750		1 Laporan	12.600.000
5	01	02	2,04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase implementasi SIPD sesuai tahapan perencanaan		100%	137.820.250		100%	143.850.000
5	01	02	2,04	0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		2 Dokumen	87.820.500		2 Dokumen	91.350.000
5	01	02	2,04	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		2 Dokumen	49.999.750		2 Dokumen	52.500.000
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		100%	440.729.775		100%	463.890.000
						Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		100%			100%	
						Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA		100%			100%	
5	01	03	2,01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase hasil koordinasi pengendalian yang ditindaklanjuti bidang pemerintah dan pembangunan manusia		100%	204.899.825		100%	215.145.000
						Persentase PD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras bidang pemerintah dan pembangunan manusia		100%			100%	
5	01	03	2,01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		2 Dokumen	86.788.150		2 Dokumen	23.100.000
5	01	03	2,01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		2 Laporan	40.989.225		2 Laporan	136.500.000
5	01	03	2,01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		2 Laporan	25.230.050		2 Laporan	42.000.000
5	01	03	2,01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia		2 Laporan	51.892.400		2 Laporan	13.545.000

Kode Rekening					Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/SubKegiatan	Rencana Tahun 2026			Cacatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	7	8	9	10
5	01	03	2,02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase hasil koordinasi pengendalian yang ditindaklanjuti bidang ekonomi		100%	29.979.950		100%	32.550.000
						Persentase PD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras bidang ekonomi		100%			100%	
5	01	03	2,02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)		2 Dokumen	7.499.750		2 Dokumen	8.400.000
5	01	03	2,02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		2 Laporan	7.493.350		2 Laporan	7.875.000
5	01	03	2,02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		2 Laporan	7.487.050		2 Laporan	8.400.000
5	01	03	2,02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Perekonomian		2 Laporan	7.499.800		2 Laporan	7.875.000
5	01	03	2,03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase hasil koordinasi pengendalian yang ditindaklanjuti bidang Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		100%	205.850.000		100%	216.195.000
						Persentase PD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		100%			100%	
5	01	03	2,03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)		2 Dokumen	9.253.100		2 Dokumen	50.295.000
5	01	03	2,03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		2 Laporan	70.212.150		2 Laporan	29.400.000
5	01	03	2,03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		2 Laporan	37.248.650		2 Laporan	57.750.000
5	01	03	2,03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Infrastruktur		2 Laporan	89.136.100		2 Laporan	78.750.000
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				399.999.500			424.999.670

Kode Rekening					Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/SubKegiatan	Rencana Tahun 2026			Cacatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	7	8	9	10
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah		80	300.000.000		80	315.000.000
5	05	02	2,02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial		100%	150.000.000		100%	157.500.000
5	05	02	2,02	0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial		1 Dokumen	150.000.000		1 Dokumen	157.500.000
5	05	02	2,03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang aspek-Ekonomi dan Pembangunan		100%	150.000.000		100%	157.500.000
5	05	02	2,03		Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan		1 Dokumen	150.000.000		1 Dokumen	157.500.000
5	05	03			PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase)		85%	99.999.500		85	109.999.670
5	05	03	2,02		Invensi dan Inovasi	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah		100%	99.999.500		100%	109.999.670
5	05	03	2,02	0004	Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah		1 laporan	79.999.600		1 laporan	87.999.670
5	05	02	2,04	0004	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi		1 laporan	19.999.900		1 laporan	22.000.000

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kota Payakumbuh menetapkan target program, kegiatan dan sub kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Target ini disusun untuk memastikan setiap langkah perencanaan mampu menjawab prioritas pembangunan daerah, sejalan dengan arah kebijakan provinsi dan nasional.

Program perencanaan pembangunan daerah ditargetkan menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif, akurat, dan berbasis data, sehingga dapat menjadi pedoman yang efektif bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan. Target kegiatan mencakup peningkatan persentase perangkat daerah yang memiliki dokumen perencanaan sesuai standar, peningkatan kualitas koordinasi lintas sektor, serta terwujudnya sistem informasi perencanaan yang terpadu. pada aspek pengendalian dan evaluasi, target difokuskan pada tersusunnya laporan capaian kinerja pembangunan yang tepat waktu, relevan, dan sesuai indikator kinerja utama daerah

Bidang penelitian dan pengembangan, target kegiatan diarahkan pada penyediaan hasil kajian dan analisis yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, dengan sasaran meningkatnya jumlah inovasi daerah yang terimplementasi.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana kerja dan pendanaan Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2026 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun 2026. Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 adalah sebagaimana tercantum pada Tabel 4.1

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						8.386.570.599,00							8.711.999.114,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						8.386.570.599,00							8.711.999.114,00	
	5.01	PERENCANAAN						7.986.571.099,00							8.286.999.444,00	
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Nilai IKM</i>	-			91,70 indeks	7.000.537.499,00						-	7.157.734.156,00	
		[Meningkatkan kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah]	Nilai IKM	93.00	91.00	91.50	91.70	7.000.537.499,00	-	-	-	-	-	-	7.157.734.156,00	-
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, panganggaran dan evaluasi</i>	-			100 %	86.480.550,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Bappeda	-	98.275.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				5 Dokumen	14.069.050,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Bappeda		15.645.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				7 Laporan	69.766.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Bappeda		80.430.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah</i>				1 Dokumen	1.322.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Bappeda		1.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			<i>Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah</i>				1 Data	1.322.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Bappeda		1.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu</i>	-			100 %	5.814.390.193,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Bappeda	-	5.794.957.943,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				39 Orang/bulan	5.418.150.393,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Bappeda		5.505.241.943,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				1 Dokumen	396.239.800,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Bappeda		289.716.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	-			100 %	46.473.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Bappeda	-	49.350.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				46 Paket	46.473.800,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Bappeda		49.350.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Indeks layanan administrasi perangkat daerah</i>	-			75 %	493.164.806,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Bappeda	-	664.364.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	4.793.400,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Bappeda		5.040.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	17.445.900,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Bappeda		58.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				8 Paket	29.993.656,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Bappeda		31.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	14.962.100,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Bappeda		15.750.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	8.866.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Bappeda		4.284.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	4.991.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Bappeda		5.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	397.609.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Bappeda		521.640.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				1 Dokumen	1.322.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Bappeda		1.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	13.181.250,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Bappeda		21.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase ketersediaan BMD</i>	-			80 %	52.052.950,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Bappeda	-	110.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				3 Unit	8.500.700,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Bappeda		63.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				6 Unit	43.552.250,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Bappeda		47.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah</i>	-			80 %	235.177.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Bappeda	-	259.350.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	82.997.200,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Bappeda		80.850.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	152.180.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Bappeda		178.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik</i>	-			80 %	272.798.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Bappeda	-	181.187.213,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	39.190.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Bappeda		45.097.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				27 Unit	204.700.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Bappeda		52.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				16 Unit	17.260.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Bappeda		21.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	11.648.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Bappeda		62.589.713,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	<i>Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD, Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD</i>	-			100 % 100, 100 %, %	545.303.825,00						-	665.375.288,00	
		[Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah]	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100	100	100	100	545.303.825,00	-	-	-	-	-	-	665.375.288,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	<i>Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPD Persentase Pagu Belanja dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat</i>	-			100 % 20.00 %	368.793.375,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Stakeholder	-	480.900.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik														
			<i>Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik</i>				1 Berita Acara	29.999.775,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Stakeholder		31.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota</i>				1 Berita Acara	71.614.975,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Stakeholder		63.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan														
			<i>Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan</i>				235 Usulan	17.999.950,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Stakeholder		18.900.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)</i>				3 Dokumen	249.178.675,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Stakeholder		367.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	<i>Persentase tingkat ketersediaan data pembangunan daerah</i>	-			98,5 %	11.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Stakeholder	-	12.075.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan</i>				1 Buku	11.500.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Stakeholder		12.075.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	<i>Persentase data capaian kinerja PD yang akuntabel Persentase PD yang mencapai target kinerja tahunan rata-rata minimal 90%</i>	-			97.75 % 93,55 %	27.190.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Stakeholder	-	28.550.288,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan</i>				1 Laporan	15.190.450,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Stakeholder		15.950.288,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah</i>				1 Laporan	11.999.750,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Stakeholder		12.600.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	<i>Persentase implementasi SIPD sesuai tahapan perencanaan Tingkat aksebilitas data</i>	-			71.43 % 100 %	137.820.250,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Stakeholder	-	143.850.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</i>				2 Dokumen	87.820.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Stakeholder		91.350.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.04.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota</i>				2 Dokumen	49.999.750,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Stakeholder		52.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	<i>1. Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, 2. Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, 3. Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA</i>	-			100.100.100 %,%,%	440.729.775,00						-	463.890.000,00	
		[1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 2. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan kewilayahan 3. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA]	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	100	100	100	100	440.729.775,00	-	-	-	-	-	-	463.890.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	<i>Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia</i>	-			100 %	204.899.825,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Stakeholder	-	215.145.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>				3 Dokumen	86.788.150,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Stakeholder		23.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia</i>				32 Laporan	40.989.225,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Stakeholder		136.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia</i>				32 Laporan	25.230.050,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Stakeholder		42.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Kordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia</i>				32 Laporan	51.892.400,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Stakeholder		13.545.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	<i>Persentase hasil koordinasi pengendalian yang ditindaklanjuti bidang ekonomi Persentase PD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras bidang ekonomi</i>	-			100 % 100 %	29.979.950,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Stakeholder	-	32.550.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>				3 Dokumen	7.499.750,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Stakeholder		8.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian</i>				14 Laporan	7.493.350,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Stakeholder		7.875.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian</i>				14 Laporan	7.487.050,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Stakeholder		8.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian</i>				14 Laporan	7.499.800,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Stakeholder		7.875.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	<i>Persentase hasil koordinasi pengendalian yang ditindaklanjuti bidang Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase PD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</i>	-			100 % 100 %	205.850.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Stakeholder	-	216.195.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)</i>				3 Dokumen	9.253.100,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Stakeholder		50.295.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</i>				16 Laporan	70.212.150,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Stakeholder		29.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</i>				16 Laporan	37.248.650,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Stakeholder		57.750.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0004	Kordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur</i>				16 Laporan	89.136.100,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Stakeholder		78.750.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						399.999.500,00							424.999.670,00	
1.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	<i>Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah yang memanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah</i>	-			80,00 %	300.000.000,00						-	315.000.000,00	
		[Meningkatnya kajian yang memanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah]	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	90	0	75	80	300.000.000,00	-	-	-	-	-	-	315.000.000,00	-
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	<i>Jumlah dokumen penelitian bidang sosial dan kependudukan yang disusun</i>	-			1 dokumen	150.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Stakeholder	-	157.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial</i>				1 Dokumen	150.000.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Stakeholder		157.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	<i>Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah Jumlah dokumen penelitian bidang ekonomi dan pembangunan yang disusun</i>	-			1 dokumen 1 Dokumen	150.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Stakeholder	-	157.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</i>				1 Dokumen	150.000.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Stakeholder		157.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.	5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	<i>Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah</i>	-			85 %	99.999.500,00						-	109.999.670,00	
		[Meningkatkan fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah]	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	95	0	81	85	99.999.500,00	-	-	-	-	-	-	109.999.670,00	-
	5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi	-	-			-	99.999.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Stakeholder	-	109.999.670,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.03.2.02.0004	Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah</i>				1 Laporan	79.999.600,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Stakeholder		87.999.670,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.03.2.02.0007	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi														
			<i>Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi</i>				1 Laporan	19.999.900,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Stakeholder		22.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
J U M L A H								8.386.570.599,00							8.711.999.114,00	

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2026, merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun kedepan. yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun 2026, Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029.

Rencana Kerja Bappeda Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, rancangan awal Rencana Kerja Bappeda, tema dan prioritas pembangunan daerah, analisis kebutuhan, pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), sasaran daerah, sasaran Perangkat Daerah, usulan dari para pemangku kepentingan serta pagu indikatif Perangkat Daerah. Pada Rumusan Rencana Kerja Bappeda memuat 5 program yang dijabarkan dalam 17 kegiatan dan 49 sub kegiatan pada tahun 2026 dengan pagu indikatif sebesar Rp. 8.386.570.599,00 (Delapan milyar tiga ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2026 telah dan akan selalu melibatkan peran stakeholder atau pemangku kepentingan. Pelibatan stakeholder dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang dan Forum Perangkat Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan renja tahun 2026

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Bappeda Kota Payakumbuh secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Renja Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2026

Dengan ditetapkannya Renja Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2026, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Payakumbuh, September 2025
KEPALA BAPPEDA KOTA PAYAKUMBUH





**PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jln. H. Rky Rasuna Said, SH, Telp. 92779 Telp. 94335 Fax. 92779 Payakumbuh 26231 e-mail : bappedapyk@yahoo.co.id

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2026

Perangkat Daerah Bappeda Kota Payakumbuh

KOLOM 1	KOLOM 2	KOLOM 3	KOLOM 4	KOLOM 5	KOLOM 6	KOLOM 7	KOLOM 8	KOLOM 9
Kebijakan / Program / Kegiatan / Tujuan	Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)	Isu Gender			Kebijakan Dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Tolok Ukur Kinerja/Data Dasar Base Line	Target Kinerja/Indikator Gender
<p>Program : Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</p> <p>Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Tujuan : Terwujudnya perencanaan yang responsif gender</p>	<p>Permendagri nomor 67 tahun 2011 yang mengamanatkan setiap pemerintah daerah membentuk Pokja PUG yang salah satu tugasnya menyusun perencanaan yang responsif gender</p>	<p>Akses Terbatasnya informasi terkait PUG</p>	<p>Belum menjadi prioritas dalam pelaksanaan tugas</p>	<p>PUG dianggap tidak menarik dan dianggap hanya mengurus masalah perempuan saja</p>	<p>Terwujudnya perencanaan yang responsif gender</p>	<p>penelahaan GAP dan GBS PD Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG</p>	<p>Perangkat Daerah yang sudah membuat GAP dan GBS</p>	<p>Input: Rp. 750.000.000</p> <p><i>output: Penganggaran yang responsif gender</i></p> <p><i>outcomes: Pterwujudnya pengarusutamaan gender di Kota Payakumbuh</i></p>
	<p>Pemahaman Kepala Perangkat Daerah terkait belum optimal</p>	<p>Partisipasi Komitmen kepala PD masih kurang ditandai dengan miminya kehadiran pada pelaksanaan sosialisasi atau dalam menindaklanjuti dalam penyusunan GAP dan GBS</p>						
	<p>PUG Masih dianggap sebagai tugas tambahan</p>	<p>Manfaat Masih dianggap sebagai beban tambahan Tidak ada punishmen dan reward</p>						

Kepala Bappeda Kota Payakumbuh



YASRIZAL, S. Sos, M.Si

NIP.19680307 199009 1 001



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. H. Rky Rasuna Said, SH, Telp. 92779 Telp. 94335 Fax. 92779 Payakumbuh 26231 e-mail : bappedapyk@yahoo.co.id

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2026

Perangkat Daerah

Bappeda Kota Payakumbuh

KOLOM 1	KOLOM 2	KOLOM 3	KOLOM 4	KOLOM 5	KOLOM 6	KOLOM 7	KOLOM 8	KOLOM 9
Kebijakan / Program / Kegiatan / Tujuan	Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)	Isu Gender			Kebijakan Dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Tolok Ukur Kinerja/Data Dasar Base Line	Target Kinerja/Indikator Gender
<p>Program : Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah</p> <p>Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</p> <p>Tujuan : Terlaksananya Musrenbang RKPD Tingkat Kota</p>	<p>- sub-kegiatan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) adalah data yang dikategorikan berdasarkan variabel-variabel seperti jenis kelamin, usia, pekerjaan, tingkat pendidikan, dan kelompok sosial tertentu. Data ini digunakan untuk memahami kebutuhan, tantangan, dan potensi yang berbeda antara kelompok masyarakat, seperti perempuan, laki-laki, anak-anak, lansia, serta kelompok rentan lainnya</p>	<p>Dengan keterlibatan mayoritas laki laki pada musrenbang tersebut maka menimbulkan beberapa permasalahan kesenjangan sebagai berikut :</p>	<p>1. Bappeda belum membuat regulasi yang mengatur representasi perempuan dan laki-laki pada Musrenbang</p>	<p>1. Adanya budaya patriarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam hal-hal publik seperti menjadi kepala keluarga, kepala desa, ketua kelompok, tokoh masyarakat dan lain sebagainya;</p>	<p>Terumuskannya RKPD Tahun 2025 yang responsive gender</p>	<p>- Penyelenggaraan Musrenbang RKPD</p>	<p>Pelaksanaan musrenbang yg bertujuan merumuskan Rancangan RKPD mayoritas dihadiri oleh Laki-laki (58%) dan perempuan 42% , dari jumlah kehadiran Musrenbang Kota. Semua Perangkat Daerah melampirkan dokumen GAP & GBS pada lampiran rencana kerja dan dan anggaran</p> <p>outcomes: Meningkatnya kehadiran perempuan, anak dan kaum termarjinalkan dan berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan</p> <p>output: Meningkatnya Jumlah kehadiran perempuan, anak dan kaum termarjinalkan dalam musrenbang; ; Meningkat usulan yang diterima di tingkat kecamatan</p>	<p>Input: 1. Peserta musrenbang utusan kecamatan, OPD dan Organisasi Kemasyarakatan dengan memperhatikan responsif gender</p> <p>output: Jumlah kehadiran perempuan, anak dan kaum termarjinalkan dalam musrenbang; Persentase usulan yang diterima di tingkat kecamatan</p> <p>outcomes: Persentase kehadiran perempuan, anak dan kaum termarjinalkan dalam musrenbang; persentase pagu belanja dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat</p>
	<p>Musrenbang salah satu instrumen untuk menjawab pendekatan bottom up dan aspiratif</p>							
	<p>Kondisi saat ini pada RKPD 2025 terkait isu - isu gender antara lain peningkatan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik yang direpresentasikan dengan keterwakilan perempuan dalam parlemen, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan direpresentasikan sebagai</p>	<p>Aspek akses : tidak ada masalah</p>	<p>Sedikitnya jumlah kuota peserta Musrenbang dari unsur keterwakilan perempuan dalam Musrenbang</p>	<p>Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang gender, yang mengartikan gender adalah mendahulukan perempuan;</p>		<p>Pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kota Payakumbuh</p>		
	<p>Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2024 peserta yang hadir 270 orang</p>	<p>Aspek Kontrol : peserta didominasi oleh laki-laki; masih rendahnya pengetahuan tentang isu gender dikalangan aparat pemerintah maupun masyarakat; masih rendahnya</p>	<p>Partisipasi perempuan belum menunjukkan kebutuhan akibat representasi perempuan dalam musrenbang yang rendah</p>	<p>Masih rendahnya pengetahuan pejabat Perangkat Daerah terkait isu gender.</p>		<p>Penyusunan RKPD 2025</p>		

KOLOM 1	KOLOM 2	KOLOM 3	KOLOM 4	KOLOM 5	KOLOM 6	KOLOM 7	KOLOM 8	KOLOM 9
Kebijakan / Program / Kegiatan /Tujuan	Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)	Isu Gender			Kebijakan Dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Tolok Ukur Kinerja/Data Dasar Base Line	Target Kinerja/Indikator Gender
	Komposisi jenis kelamin yang hadir 58% laki - laki dan 42 % Perempuan	Aspek Manfaat : rendahnya pemahaman tentang isu gender; meskipun sudah memiliki pengetahuan tentang isu gender, namun komitmen Kepala Perangkat Daerah untuk mengimplementasikan isu gender pada pelaksanaan program/kegiatannya masih rendah.	Kelompok rentan belum memperoleh akses pembangunan yang setara	Terbatasnya jumlah peserta yang diundang dalam musrenbang dikelurahan		Mengakomodir pelaksanaan musrenbang kelurahan, kecamatan dan Kota		
		Aspek Partisipasi : Keterlibatan perempuan sangat terbatas dalam kegiatan Musrenbang		Belum optimalnya Focal Point Gender seluruh Perangkat Daerah di Pemerintahan Kota Payakumbuh				

Kepala Bappeda Kota Payakumbuh



YASRIZAL,S.Sos,M.Si

NIP.19680307 199009 1 001



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH


Jln. H. Rky Rasuna Said, SH, Telp. 92779 Telp. 94335 Fax. 92779 Payakumbuh 26231 e-mail :
bappedayk@yahoo.co.id

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)

SKPD : **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN : **2026**

PROGRAM	Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
KEGIATAN	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
SUB KEGIATAN	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
KODE KEGIATAN	5.01.02.2.01.0005
ANALISIS SITUASI	<ol style="list-style-type: none">1. Rendahnya Partisipasi Perempuan:<ol style="list-style-type: none">a. Perempuan cenderung kurang terlibat dalam forum Musrenbang karena norma sosial yang membatasi peran mereka dalam pengambilan Keputusanb. Jadwal Musrenbang sering kali tidak memperhatikan kebutuhan perempuan, seperti waktu yang bentrok dengan tanggung jawab rumah tangga2. Kurangnya Representasi Perspektif Gender:<ol style="list-style-type: none">a. Program atau usulan yang diajukan dalam Musrenbang sering kali tidak memasukkan kebutuhan spesifik perempuan, anak-anak, atau kelompok rentan lainnyab. Fokus lebih dominan pada kebutuhan kelompok laki-laki atau umum tanpa mempertimbangkan dampak berbeda bagi tiap gender3. Minimnya Edukasi dan Kesadaran Gender<ol style="list-style-type: none">a. Peserta, khususnya laki-laki, mungkin kurang memahami pentingnya perspektif gender dalam Pembangunanb. Tidak adanya pelatihan atau pendampingan terkait analisis gender untuk pemangku kepentingan4. Akses Terbatas untuk Kelompok Rentan<ol style="list-style-type: none">a. Perempuan penyandang disabilitas atau dari komunitas terpencil sering kali kesulitan untuk hadir atau berpartisipasi aktif dalam Musrenbangb. Hambatan fisik, ekonomi, dan transportasi juga menjadi tantangan.

RENCANA TINDAK	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
		Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Partisipasi Gender dalam Proses Musrenbang 2. Mewujudkan Pembangunan yang Inklusif dan Responsif Gender 3. Mengurangi Kesenjangan Gender dalam Hasil Pembangunan 4. Memperkuat Kapasitas Peserta dan Pemangku Kepentingan 5. Mendorong Akuntabilitas dan Transparansi Gender
		Aktivitas 1	Mengadakan sesi khusus untuk kelompok perempuan dan kelompok rentan agar dapat menyampaikan usulan mereka
		Aktivitas 2	Mengatur jadwal pelaksanaan yang fleksibel untuk mendukung kehadiran perempuan dan kelompok rentan
		Aktivitas 3	Menyediakan fasilitas ramah gender, seperti penitipan anak dan ruang aman bagi perempuan
		Sumber daya (Input)	Dana : APBD
			Panitia : Bappeda
			Perangkat Daerah se-Kota Payakumbuh, DPRD Kota Payakumbuh, Lurah, Fasilitator kelurahan, Delegasi dari Kecamatan, Lembaga Non Pemerintah; Perguruan Tinggi, LSM terkait, Asosiasi Profesi, Perbankan dan BUMN di Kota Payakumbuh; Keterwakilan Perempuan dan kelompok termajinalkan

		lainnya.
	Output /Sub output 1	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota
	Anggaran	Rp. 75.000.000,-
	SDM	Panitia : 37 orang, L= 14 orang ; P = 23 orang Peserta : 270 orang Narasumber: 9 orang
	Peralatan dan Mesin	Laptop 3 unit
OUTCOOME	<p><u>Rumusan Kinerja Outcome :</u> Meningkatnya kehadiran perempuan, anak dan kaum termarjinalkan dan berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan.</p> <p><u>Indikator Kinerja Outcome:</u> Jumlah berita acara .</p>	
<p>KEPALA BAPPEDA KOTA PAYAKUMBUH</p>  <p><u>YASRIZAL,S.Sos,M.Si</u> NIP.19680307 199009 1 001</p>		



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. H. Rky Rasuna Said, SH, Telp. 92779 Telp. 94335 Fax. 92779 Payakumbuh 26231 e-mail :
bappedapyk@yahoo.co.id

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)

SKPD : **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN : **2026**

PROGRAM	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah		
KEGIATAN	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		
SUB KEGIATAN	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		
KODE KEGIATAN	5.01.02.2.01.0007		
ANALISIS SITUASI	<ol style="list-style-type: none">1. Rendahnya Keterlibatan Perempuan<ol style="list-style-type: none">a. Perempuan jarang dilibatkan secara aktif dalam proses koordinasi, sehingga kebutuhan spesifik mereka tidak terakomodasi dalam dokumen perencanaan2. Minimnya Perspektif Gender dalam Dokumen:<ol style="list-style-type: none">a. Dokumen perencanaan sering kali tidak mencakup analisis gender, sehingga program pembangunan yang dihasilkan cenderung bersifat netral gender tanpa memperhatikan dampaknya pada kelompok tertentu3. Ketimpangan Akses Informasi<ol style="list-style-type: none">a. Kurangnya akses perempuan dan kelompok rentan terhadap informasi terkait proses penyusunan dokumen perencanaan		
RENCANA TINDAK	Kegiatan / Sub Kegiatan	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
		Tujuan	<ol style="list-style-type: none">1. Integrasi Perspektif Gender dalam Dokumen Perencanaan2. Peningkatan Partisipasi Gender3. Penyediaan Data Terpilah Berdasarkan Gender

			4. Mendorong Akuntabilitas Gender dalam Pembangunan
		Aktivitas 1	Memastikan dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti RPJMD dan RKPD, menyertakan analisis dan rekomendasi berbasis gender
		Aktivitas 2	Mendorong pelibatan perempuan, laki-laki, dan kelompok rentan dalam proses koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan.
		Aktivitas 3	Mengintegrasikan data terpilah berdasarkan gender sebagai dasar penyusunan program yang lebih inklusif
		Aktivitas 4	Menetapkan indikator keberhasilan yang responsif gender dalam dokumen perencanaan
		Sumber daya (Input)	Dana : APBD
			Perangkat Daerah
		Output /Sub output 1	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti RPJMD, RKPD, dan Renja OPD, yang sesuai dengan prinsip inklusivitas dan pengarusutamaan gender
	Anggaran	Rp. 750.000.000,-,-	
	SDM	31 ASN	
	Peralatan dan Mesin	Laptop 31 unit	
OUTCOOME	<u>Rumusan Kinerja Outcome :</u>		

Meningkatnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, khususnya perempuan dan kelompok rentan..

Indikator Kinerja Outcome:

Jumlah dokumen perencanaan yang disusun

KEPALA BAPPEDA KOTA PAYAKUMBUH



YASRIZAL, S.Sos, M.Si
NIP.19680307 199009 1 001